

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Pramusinto, 2009, *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan, dan Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- A.S.S., Tambunan, 1995, *Pemilu di Indonesia dan Susunan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD*, Bandung: Binacipta
- Azyumardi Azra, 2000, *Pendidikan Kewarganegaraan (civic education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Kencana
- Dahlan Thaib, 1993, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Jakarta: Liberty
- Bintan R. Saragih, 2006, *Hukum Tata Negara*, Bandung: C.V. Utomo
- CST. Kansil, 2000, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta
- Ibrahim Amirudin, 2016, *Hukum Kelembagaan Negara*, Yogyakarta
- Jenedjri M. Gaffar, 2012, *Politik Hukum Pemilu, Konstitusi Press*, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, jilid II, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta
- 2013, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, Jakarta
- Miriam Budiardjo, 2007, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama
- 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi (Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama
- Moh. Isnaeni, 1982, *MPR-DPR Wahana mewujudkan Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Yayasan Idayu
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* Jakarta:Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI
- Muhammad Asfar, 2002, *Model-model Sistem Pemilihan di Indonesia*, Pusat Studi Demokrasi dan HAM, Surabaya

Munir Fuady, 2010, *Konsep Negara Demokrasi*, Bandung: PT. Refika Aditama

Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, Hasyim Asy'ari, 2011, *Menyederhanakan Waktu Penyelenggaraan Pemilu: Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah*, Seri Elektoral Demokrasi. Buku 2, Jakarta: Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan

Sodikin, 2014, *Hukum Pemilu (pemilu sebagai praktek ketatanegaraan)*, Jakarta: Gramata Publishing

Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden,

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum,

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

C. Jurnal

Budiyono, "Mewujudkan Pemilu 2014 Sebagai Pemilu Demokratis", Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No. 3: 2014

Nanik Prasetyoningsih, *Dampak Pemilihan Umum bagi Demokrasi Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta: 2014

Iwan Satriawan, “*Desentralisasi Pemilu*”, Jurnal Konstitusi Universitas Lampung Volume III No. 1, Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta: Juni 2014

Khoiril Huda, Zulfa, Azzah Fadhlika, *Pemilu Presiden 2019: Antara Kontestasi Politik dan Persaingan Pemicu Perpecahan Bangsa*, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 3 Tahun 2018

Ria Casmi Arrsa, *Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi*, Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, 2014

Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, 2009

Yeremia Shedeas Siahaan, Fitra Arsil, *Pemilihan Umum Serentak di Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum Indonesia

D. Internet

https://www.researchgate.net/publication/299537176_Eksistensi_Presidential_Threshold_Pada_Pemilihan_Umum_Serentak_2019

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/2941-hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi.html>

<https://sultra.kpu.go.id/artikel/artikel-pemilu-konstitusi-baru-tahun-2019/>

<https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019>

